



# Pranatan Anyar



Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima vaksinasi Covid-19 dosis kedua di rumah dinas, Jakarta.

## WAPRES DIVAKSIN DOSIS KEDUA Jaga Diri dari Penyakit, Wajib

JAKARTA (KR) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menerima vaksin Covid-19 dosis kedua, Rabu (17/3), di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta. Bertindak sebagai vaksinator Dwi Edi Wahono dari Tim Dokter Kepresidenan. Dalam kesempatan tersebut hadir juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.

Sebelumnya, Wapres telah menerima vaksin dosis pertama pada Rabu (17/3) lalu. Wapres terlihat melewati seluruh rangkaian vaksinasi, mulai dari registrasi pada meja pendaftaran, melakukan pengecekan kesehatan, menerima suntikan vaksin, dan terakhir menunggu masa observasi pascavaksinasi selama 30 menit.

Usai disuntik vaksin, Wapres Ma'ruf mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi aturan Pemberlakuan Pema-

atasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku.

"Walaupun sudah divaksin dua kali, tetap juga harus menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan juga mematuhi aturan PPKM. Walaupun sudah divaksin, masih ada saja yang bisa tertular," katanya.

Wapres juga mengajak seluruh masyarakat kelompok lanjut usia untuk tidak menolak vaksin dan segera menjalani vaksinasi supaya dapat menjaga diri dan lingkungan dari Covid-19. "Menjaga diri dari penyakit, dalam agama, itu wajib. Maka sekali lagi saya mengajak masyarakat, terutama yang sudah *sepuh-sepuh*, untuk segera divaksinasi," tegasnya.

Pada vaksinasi tahap pertama, Wapres mengungkapkan tidak merasakan efek samping dari vaksinasi tersebut. Wapres juga mengajak masyarakat agar tidak ragu melakukan vaksinasi. (Sim)-f

## WAKSINASI LANSIA HARUS HATI-HATI Penting, Edukasi Setelah Divaksin

YOGYA (KR) - Meski penambahan kasus positif Covid-19 di DIY cenderung menurun dalam beberapa waktu terakhir dan pelaksanaan vaksinasi terus digencarkan, kedisiplinan masyarakat dalam menegakkan protokol kesehatan (prokes) harus terus ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari. Vaksinasi tidak boleh lantas menjadikan masyarakat abai terhadap prokes.

"Supaya kasus Covid-19 terus menurun, Pemerintah dengan dukungan seluruh pihak perlu melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan prokes meski mereka sudah divaksin. Karena walaupun sudah divaksin, bukan berarti mereka tidak bisa terpapar Covid-19," kata epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Bayu Satria Wiratama, Rabu (17/3).

Bayu mengungkapkan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, tidak bisa dipungkiri mampu menekan jumlah kasus. Kendati demikian masyarakat

tidak boleh terlena dan bersikap masa bodoh dalam penegakan prokes. Untuk itu dibutuhkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Salah satunya tentang perlunya tetap disiplin prokes setelah divaksin. Bahkan sebaiknya edukasi disampaikan di tempat vaksinasi, sehingga masyarakat bisa memahami informasi yang disampaikan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Mengenai pelaksanaan vaksinasi di DIY, Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setyaningastutie MKes mengatakan, vaksinasi Covid-19 bagi lansia sudah mulai dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Kendati begitu,

jumlah lansia di DIY yang sudah divaksin belum sesuai target. Karena dari total sasaran sekitar 295.000 lansia, baru 6.854 lansia yang sudah divaksin tahap pertama dan 188 orang divaksin kedua kalinya. Masih rendahnya capaian vaksinasi lansia ini disebabkan belum adanya vaksinasi massal untuk kalangan tersebut.

"Dinkes DIY masih mempertimbangkan penyelenggaraan vaksinasi massal bagi lansia. Karena penyuntikan vaksin untuk lansia masih diprioritaskan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di setiap kabupaten/kota. Hal itu dikarenakan lansia merupakan kelompok rentan, sehingga pelaksanaan vaksinasi massal harus dilakukan dengan persiapan khusus dan penuh kehati-hatian," katanya.

Pembajun menyatakan, vaksinasi terhadap lansia membutuhkan perhatian khusus dibandingkan kelompok masyarakat lain. Jika terjadi KIPi bisa segera ditangani dengan fasilitas yang lengkap. (Ria/Ira)-d

## Pemerintah Percepat 'Herd Immunity'

JAKARTA (KR) - Pemerintah terus berupaya mempercepat terwujudnya *herd immunity* atau kekebalan komunitas guna menekan laju pertumbuhan kasus Covid-19 di Indonesia.

Menurut Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Rabu (17/3), Pemerintah melakukan berbagai cara untuk mempercepat *herd immunity* yang saat ini sedang menjadi perhatian banyak pihak.

Salah satunya, Pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melaksanakan vaksinasi massal. "Lokasi pelaksanaan vaksinasi massal terus diperbanyak," kata Siti Nadia dalam Diskusi Alinea Forum bertema 'Peta Jalan Menuju *Herd Immunity*'.

Kementerian Kesehatan menyadari, upaya mempercepat vaksinasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan vaksin Covid-19, tetapi juga vaksinator. Karena itu, Pemerintah terus menambah jumlah tenaga vaksinator, bekerja sama dengan asosiasi klinik swasta hingga Fasilitas Pe-

layanan Kesehatan milik kementerian dan lembaga.

Selanjutnya, Pemerintah berharap masyarakat yang menerima vaksin bisa terus meningkat, di atas 500.000 orang perhari.

Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio mengatakan, untuk mencapai kekebalan kelompok tergantung pada beberapa faktor, seperti jumlah pasien yang telah disuntik dan efikasi vaksin Covid-19. Juga terkait lama kekebalan tubuh setelah disuntik vaksin Covid-19. (Ant)-d

### YANG ASLI ADA PENGAMAN BERLAPIS

## Waspada! Pemalsuan Buku Nikah

JAKARTA (KR) - Masyarakat diminta mewaspada! terjadinya pemalsuan buku nikah. Oleh karena itu, Kemenag meminta masyarakat hati-hati dengan beredarnya buku nikah palsu. Hal ini menyusul adanya informasi penangkapan pelaku yang diduga telah melakukan pemalsuan buku nikah di Jakarta Utara.

Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin memberikan panduan bagi masyarakat untuk dapat mengenali buku nikah asli. Ia menyebutkan, buku nikah asli keluaran Kemenag memiliki pengaman berlapis. "Buku nikah yang dikeluarkan Kemenag dilengkapi perangkat pengaman berlapis, di antaranya menggunakan kertas *security printing*, *visible ink multi colour*, ada bagian-bagian yang dicetak timbul, menggunakan hologram yang sulit dipalsukan," terang Kamaruddin di Jakarta, Rabu (17/3).

Sebelumnya, jajaran kepolisian

berhasil mengungkap sindikat pemalsuan buku nikah di wilayah Cilincing Jakarta Utara. Polisi menangkap sedikitnya tujuh orang pelaku yang diduga terlibat dalam tindakan tersebut. Selain mengamankan tujuh orang, polisi juga menyita barang bukti berupa enam buku nikah warna coklat dan hijau yang sudah terisi data, 40 buku nikah hijau kosong, 40 buku nikah merah kosong, 1.000 lembar sampel buku nikah warna merah dan 1.850 sampel buku nikah warna hijau, stempel, mesin press, mesin pengering, alat laminating, alat sablon, handphone,

seperangkat komputer beserta printer dan uang tunai hasil kejahatan.

Kamaruddin menjelaskan, pada bagian lain, data nikah yang dicetak dalam buku nikah adalah data yang telah terintegrasi dengan data berbasis e-KTP. Kemudian, pada bagian halaman tanda tangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat *quick response code* atau kode QR yang terkoneksi dengan aplikasi Simkah berbasis web.

Ia menambahkan, bagi masyarakat yang ingin memastikan keaslian buku nikahnya, dapat melakukan pemindaian pada QR Code yang tertera pada buku nikah. QR Code yang dicetak pada buku nikah mulai terbitan tahun 2019 itu terhubung ke data pengantin yang tercatat di aplikasi Simkah. Sedangkan bagi masyarakat yang buku nikahnya terbit sebelum tahun 2019, dapat menghubungi petugas resmi KUA. (Ati)-f



KR-Antara/Harvian Perdana Putra

DANA STIMULUS UMKM: Perajin menjemur kain batik di Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (17/3). Pemerintah mengalokasikan program Rp 184,83 triliun untuk kebutuhan UMKM dan biaya korporasi dalam bentuk stimulus, yaitu subsidi bunga UMKM, bantuan produktif usaha mikro, subsidi imbal jasa penjaminan, penempatan dana pada bank umum dengan berupa insentif pajak, serta dukungan lain.

### PRESIDEN INGATKAN PEKERJA Tingkatkan Kemampuan dan Keterampilan

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pentingnya peningkatan kemampuan dan keterampilan pekerja di Indonesia, karena perubahan kebutuhan industri terhadap dunia kerja sangat cepat.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi pada acara Penerimaan Kartu Prakerja Tahun 2020-2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/3).

Presiden mengatakan, sebanyak 88 persen dari total peserta Program Kartu Prakerja berhasil meningkatkan keterampilan mereka untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. "Apa yang disimpulkan dari survei yang ada? 88 persen keterampilannya meningkat. Ini yang kita harapkan karena dalam zaman yang penuh dengan kompetisi seperti ini. Kalau keterampilan kita, setiap hari tidak kita perbaiki, perbaiki, perbaiki, hilang kita," kata Presiden.

Untuk itu Presiden Jokowi meminta para pekerja untuk menanamkan inisiatif pada dirinya untuk terus meningkatkan kemampuan diri agar bisa bersaing di era hiper-kompetisi seperti saat ini.

Dalam Program Kartu Prakerja, terdapat 1.700 jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh 165 lembaga pelatihan. Para peserta dibebaskan untuk memilih pelatihan sesuai potensi dan minat. "Saya memulai usaha dulu dari nol juga dimulai dari ikut pelatihan. Dulu sepekan tapi kalau ini kan sekarang sudah zaman digital seperti ini, bapak-ibu bisa belajar online. Itu akan lebih mempercepat," ujarnya. Saat ini, jumlah peserta Program Kartu Prakerja baru sekitar 5,6 juta orang. Padahal masyarakat yang mendaftar Program Kartu Prakerja mencapai 55 juta orang. (Sim/Lmg)-d

### 643 Bandar Narkoba Dipindah ke Nusakambangan

JAKARTA (KR) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) memindahkan sebanyak 643 bandar narkoba ke Nusakambangan sebagai salah satu bentuk upaya mengatasi peredaran narkoba yang dikendalikan dari lapas di Tanah Air.

"Kami memindahkan 643 bandar narkoba ke lapas *maximum security* di Nusakambangan demi menangani peredaran gelap narkoba yang dikendalikan dari lapas atau rutan," kata Menkumham Yasonna Laoly dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (17/3).

Pemindahan secara massal tersebut merupakan pertama kali dilakukan dan akan terus berlanjut oleh kementerian terkait. Yasonna mengakui, memang ada yang mencoba berusaha agar para bandar narkoba tidak dipindahkan, namun hal itu tidak bisa dicegah. Sebab, sudah merupakan suatu komitmen.

Lebih rinci, 643 warga binaan kategori bandar dan risiko tinggi yang dipindahkan tersebut berasal dari lapas atau rutan di 12 kantor wilayah yakni 99 orang dari DKI Jakarta, 76 orang dari Lampung, 50 orang dari Aceh, 48 orang dari Yogyakarta dan 91 orang dari Jabar. Kemudian, 54 orang dari Sumatera Utara, 50 orang dari Sumatera Selatan, 47 orang dari Riau, 46

orang dari Banten, 43 orang dari Kalimantan Barat, 21 orang dari Jatim serta 18 orang dari Bali.

Di samping itu, Yasonna mengatakan, kebijakan pemindahan tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah penghuni di Nusakambangan. Bahkan, langsung penuh. Sebab, tahanan hanya satu orang dalam satu sel. Hal itu kemudian disikapi dengan membangun satu lapas khusus napi risiko tinggi bandar narkoba di Pulau Nusakambangan pada 2021.

"Sebagai akibat dari pemindahan bandar narkoba, lapas *maximum security* di Nusakambangan sudah penuh. Untuk itu kita akan membangun lapas di Nusakambangan," ujarnya.

Selain itu, Yasonna mengatakan jajarannya telah memindahkan enam mantan petugas pemasyarakatan yang dipidana terkait kasus narkoba ke Nusakambangan.

Kebijakan itu tidak terlepas dari komitmen Kemenkumham dalam menjatuhkan sanksi tegas terhadap jajarannya yang bermain-main dengan peredaran narkoba di dalam lapas atau rutan. Ia juga berharap agar Komisi III DPR mendorong revisi UU Narkotika untuk mengatasi *overcrowding* (melebihi kapasitas) di dalam lapas atau rutan. (Ant)-d

### RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Diharapkan Disahkan Tahun Ini

JAKARTA (KR) - Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) diharapkan dapat disahkan pada tahun 2021 ini, mengingat saat ini hampir setengah pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk RUU PDP itu sudah dibahas hingga Januari 2021.

Harapan itu disampaikan Direktur Tata Kelola, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Mariam F Barata dalam Webinar Nasional yang diselenggarakan ICT Watch bertajuk 'Menjaga Privasi dan Melawan Hoaks Covid-19' di Jakarta, Rabu (17/3).

"Proses penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi ini sebenarnya sudah bergulir sejak 2020, pembahasan dengan DPR kita saat ini sudah mencapai pembahasan 145 DIM dari 371 DIM yang ada. Akhir Maret kami mulai pembahasan lagi, diharapkan 2021 ini bisa selesai dan ketok palu," kata Mariam.

Mariam mengatakan, nantinya akan ada tiga hal yang diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi, yaitu warga sebagai subjek data (pemilik data pribadi), pihak pengendali data, serta pihak pemroses data. Ketiga hal yang diatur dalam UU PDP itu nantinya harus berkomitmen untuk menjaga data terkait informasi pribadi agar tidak terjadi kebocoran yang berujung pada pelanggaran hingga penyalahgunaan data.

"Kita harap dengan adanya UU PDP, kegiatan atau aktivitas yang terkait dengan kebocoran data pribadi bisa ditindaklanjuti dan diberikan hukum jika ditemukan pelanggaran terhadap data itu," ujar Mariam. (Ant)-f